

RESISTENSI UMKM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DALAM PEMBERDAYAAN MODAL USAHA SISTEM PUSYAR IB DI PT. BPRS  
BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

Very Andrianingsih<sup>1</sup>  
Dwiki Erik Fatah Adhiyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. [veryandrianingsih@yahoo.co.id](mailto:veryandrianingsih@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>. [adi.erik11@yahoo.com](mailto:adi.erik11@yahoo.com)

Program Studi Manajemen, Universitas Wiraraja

**ABSTRACT**

*In generating the Small-Medium Enterprises (UMKM) business Sumenep Regency issued Syari'ah Business Financing (PUSYAR), Program. This program is a product of synergy or collaboration of Bhakti BPRS Sumekar Ltd Sumenep Regency, with National Zakat Agency (BAZNAS) Sumenep Regency, Department of Cooperatives and Small-Medium Enterprises, as well as the Department of Industry and Trade Sumenep Regency. In answering these problems, the researchers use qualitative research with interviews and observations. The results showed the existence of iB PUSYAR which became the MOU between the BPRS and BAZNAS, Sumenep with financing PUSYAR maximum Rp.5 million and margins in pay by BAZNAS where resistance for the recipient, PUSYAR to need the existence of a PUSYAR to be given greater so that it can increase sales and without refunds or repayments to the BPRS or completely on the responsibility by BAZNAS Regency Sumenep.*

**Keyword :** Resistensi UMKM, Empowerment and Pusyar IB

**ABSTRAK**

Dalam membangkitkan usaha UMKM Kabupaten Sumenep mengeluarkan Program PUSYAR iB Syari'ah, program ini merupakan sebuah produk sinergi atau kerja sama PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam rangka pemberian pembiayaan penguatan permodalan bagi masyarakat UMKM dan IKM Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan adanya PUSYAR iB yang menjadi MOU antara BPRS dan BAZNAS Sumenep, dengan pembiayaan PUSYAR maksimal Rp. 5.000.000 dan margin di bayar oleh BAZNAS dimana resistensi bagi penerima PUSYAR menginginkan adanya PUSYAR untuk diberikan lebih besar sehingga bisa menambah penjualan dan tanpa pengembalian atau cicilan kepada BPRS atau sepenuhnya di tanggung oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : Resistensi UMKM, Pemberdayaan dan Pusyar IB

Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi  
ISSN : 2339-2185

## PENDAHULUAN

Sebagai upaya mempertahankan diri dari keterpurukan, Pemerintah tetap melakukan pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat/komunitas dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui strategi pembangunan dengan mengutamakan pendekatan yang lebih merakyat, di mana program-program harus memenuhi kategori dari, untuk, dan oleh rakyat (*bottom up*). Dimana kehidupan bermasyarakat sedikit banyak akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berlebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Sedangkan Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si berharap melalui pelaksanaan Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR iB) di Kabupaten Sumenep diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya para pengusaha kecil menengah dengan tanpa bunga dan biaya apapun. Dengan adanya program tersebut banyak harapan masyarakat agar dapat membantu usaha mereka lebih maju lagi dan memperbaiki perekonomian. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR iB) merupakan Kerjasama antara BPRS Bhakti Sumekar, BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi, dan UKM serta Disperindag Sumenep, memang diprogramkan tanpa bunga dan tanpa biaya. Hanya saja, memang tetap ada agunan untuk peminjaman diatas Rp. 1 juta. Dana pinjaman di mulai dari nominal 1 juta sampai 5 juta, dengan harapan dapat membantu atau mempermudah pemodal usaha mereka. Berdasarkan uraian data diatas yang cukup lengkap dan jelas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

Bagaimana Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Berdasarkan

Sistem PusyariB Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ?

Tujuan penelitian pada dasarnya hendak menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Berdasarkan Sistem PusyariB Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

## TINJAUAN TEORETIS

Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen keuangan perusahaan adalah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek.

Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawab berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi:

1. Keputusan Investasi Keputusan
2. Keputusan Pendanaan,
3. Kebijakan Deviden, agar tidak adanya kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena laba yang ditahan juga mempengaruhi investasi perusahaan selanjutnya.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik- praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).

Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut: (Imamul Arifin, 2007:14).

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ansoff (2008, hal. 207) mendefinisikan resistensi sebagai fenomena beragam, yang memperkenalkan penundaan tak terduga, biaya dan ketidakstabilan ke dalam proses perubahan strategis, sementara Zaltman dan Duncan (1977, hal. 63) mendefinisikan resistensi sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan untuk mengubah status quo. Beberapa faktor resistensi yang lazim terjadi dalam perubahan organisasi adalah sebagai berikut: (Lim dan Loh, 2009 : 42).

1. Kebiasaan kerja. Orang sering resisten terhadap perubahan karena menganggap kebiasaan yang baru dianggap merepotkan atau mengganggu.
2. Keamanan. Seperti takut dipecat, atau kehilangan jabatan.
3. Ekonomi. Faktor ekonomi seperti gaji paling sering dipertanyakan, karena orang sangat tidak megharapkan gajinya turun.
4. Sesuatu yang tidak diketahui.

Istilah lain yang sering dipakai mengenai resistensi terhadap perubahan adalah karena setiap perubahan akan mengganggu zona nyaman (*comfort zone*), yaitu kebiasaan -

kebiasaan kerja yang selama ini dirasakan nyaman. Schein (2009 : 88) berpendapat resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu yang paling mendasar pada fenomena organisasi. Sejumlah penulis telah menentukan resistensi. Sonnenberg tahun (2009 : 94), mengidentifikasi tujuh alasan mengapa orang resisten terhadap perubahan, yaitu:

1. *Procastination.*

Kecenderungan menunda perubahan, karena merasa masih banyak waktu untuk melakukan perubahan.

2. *Lack of motivation.*

Orang berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak memberikan manfaat sehingga enggan berubah.

3. *Fear of failure.*

Perubahan menimbulkan pembelajaran baru. Orang takut kalau nantinya ia tidak memiliki kemampuan yang baik tentang sesuatu yang baru tersebut sehingga ia akan gagal.

4. *Fear of the unkown.*

Orang cenderung merasa lebih nyaman dengan hal yang diketahuinya dibandingkan dengan hal yang belum diketahui. Perubahan berarti mengarah kepada sesuatu yang belum diketahui.

5. *Fear of loss.*

Orang takut kalau perubahan akan menurunkan job security, power atau status.

6. *Dislike the innitiator of change.*

Orang sering sulit menerima perubahan jika mereka ragu terhadap kepiawaian inisiator perubahan atau tidak menyukai anggota agen perubahan.

7. *Lack of communication.*

Salah pengertian akan apa yang diharapkan dari perubahan, Informasi yang disampaikan tidak utuh dan komprehensif

Dalam kombinasi, aspek-aspek resistensi membuat kasus persuasif untuk mengevaluasi kembali pemahaman klasik perlawanan. Sama, mereka mempertanyakan asumsi bahwa upaya perubahan yang bertemu dengan sedikit

perlawanan harus secara otomatis dianggap perubahan “baik”. Proses legislatif, misalnya, adalah didasarkan pada resistensi memainkan peran penting dalam memastikan hukum terbaik yang dihasilkan. Perlawanan, dalam bentuk persaingan antara (setidaknya) dua pihak, menyuntikkan energi ke dalam proses dan percikan api perdebatan di mana pendapat berbeda. *Community Based Development* (pengembangan masyarakat) dapat didefinisikan sebagai “Kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya” (Budimanta, 2008 : 40), Tujuan dari *community based development* menurut Budimanta (2008:43) adalah menitik beratkan pada masyarakat dan di sekitarnya, yaitu :

1. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PEMDA terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik di sekitar wilayah perusahaan.
2. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat
3. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari program *community based development* ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berada di sekitar wilayah perusahaan.
2. Pengembangan dan peningkatan sarana wilayah seperti kesehatan, transportasi, pendidikan dan keagamaan yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah tersebut.
3. Mendorong dan mengembangkan potensi-potensi kewirausahaan yang didasarkan pada sumber daya local
4. Pengembangan kelembagaan lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

(Budimanta, 2008:42)

Ruang lingkup *community based development* , menurut Budimanta (2008 : 43) meliputi tiga aspek, yaitu :

#### 1. *Community Services*

Merupakan pelayanan pemerintah atau organisasi untuk memenuhi kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, pengembangan kualitas pendidikan, keagamaan dan kewirausahaan mandiri dan lain sebagainya

#### 2. *Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

#### 3. *Community Relations*

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait dalam pengembangan kegiatan.

Program pengembangan masyarakat (*community development*) memiliki tiga karakter utama yaitu:

1. Berbasis masyarakat (*community based*)
2. Berbasis sumber daya setempat (*local resource based*)
3. Berkelanjutan (*sustainable*).

Pengembangan diri sebagai wujud dari pemberdayaan tampaknya dapat disepadankan dengan istilah pengembangan kepribadian (*personal development*), sudah lazim digunakan dan banyak dikenal meskipun istilah diri (*self*) tidak sepenuhnya identik dengan kepribadian (*personality*). Oleh karena pemberdayaan ini juga timbul dalam diri seseorang untuk berkembang. kesadaran dan identitas, mengembangkan bakat dan potensi, membangun modal manusia dan memfasilitasi kerja. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan harga terjangkau. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks pembangunan nasional fungsi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Fungsi penyembuhan, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami masalah. Misalnya kepada orang yang mengalami bencana alam ( gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran)
2. Fungsi pencegahan. Memberikan bantuan terhadap kemungkinan munculnya masalah-masalah sosial dengan melihat gejala-gejala sosial yang terjadi serta pengambilan tindakan untuk menghindari manusia tersebut.
3. Fungsi pengembangan, yaitu pemberian bantuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya.
4. Fungsi penunjang, bantuan ini diberikan guna mencapai tujuan-tujuan pelayanan dalam sektor lain.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan social.
2. Peningkatan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang

menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan,

3. Penyempurnaan kebebasan, melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan, (Suharto, 2009 : 127).

Pusyar iB adalah sebuah produk Sinergi / Kerjasama antara PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam rangka Pemberian Pembiayaan penguatan permodalan bagi masyarakat UMKM dan IKM Kabupaten Sumenep. Landasan dari penyelenggaraan Pusyar iB BPRS Kabupaten Sumenep

1. Nota Kesepahaman antara PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
2. Perjanjian Kerjasama antara PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep,

Tujuan dari dibentuknya Pusyar iB adalah untuk memberikan secara khusus peningkatan akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM masyarakat Kabupaten Sumenep. Aplikasi PUSYAR iB yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, yaitu :

1. Akad penyaluran pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* dan *Mudharabah*
2. Bank memberikan pembiayaan kepada (UMKM dan IKM ) sebesar Rp. 5.000.000,- dan wajib membayar kembali sebesar pinjaman, Margin, biaya administrasi dan premi asuransi ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan melalui Pusyar ib, yaitu: Kriteria Pusyar iB
  - a) Nasabah adalah warga Kabupaten Sumenep
  - b) Memiliki aset usaha kurang
  - c) Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di Diskoperindag (Black List) atau bank

lain

- d) Bersedia membuka rekening tabungan di BPR Syariah Kabupaten Sumenep sebagai aktifitas usaha

Persyaratan Pusyar iB

- a) FC KTP Suami ( Pemilik Usaha )
- b) FC KK & Surat Nikah
- c) Materai
- d) Surat Keterangan Usaha
- e) Surat Keterangan Domisili

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan memberikan gambaran secara mendetail atas objek yang diteliti, yang selanjutnya dilakukan analisa secara naratif. Fokus dalam penelitian ini yang mengandung dimensi kunci pemberdayaan UMKM melalui Pusyar iB Syariah dengan mengambil teori Suharto, (2009 : 127). adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan modal usaha, Pemberian pembiayaan usaha dari Pusyar iB dengan margin dari BAZNAS Kabupaten Sumenep
- b. Peningkatan standar hidup, Melalui seperangkat pelayanan Pusyar iB dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.
- c. Peningkatan keberdayaan, Melalui penetapan sistem Pusyar iB dalam permodalan lebih kuat dalam mengembangkan usaha UMKM
- d. Penyempurnaan kebebasan, melalui Pusyar iB dalam penguatan modal dapat perluasan aksesibilitas dengan aspirasi kewirausahaan mandiri UMKM,

Lokasi penelitian dalam pemberian pembiayaan melalui Pusyar iB Syariah kepada UMKM di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam waktu 6 bulan, pertimbangan untuk menjaga kevalidan data.

Sampel dalam penelitian ini merupakan tempat (*place*), pelaku (*actors*), aktivitas (*activity*) dan orang kunci (*key person*), yaitu :

1. Informan Kunci, Informan kunci adalah

orang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok atas pelaksanaan dan pembiayaan UMKM melalui Pusyar iB. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Direktur BPRS, dan Sekretaris BAZNAS.

2. Informan Utama, Informan utama adalah orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial dalam atas pembiayaan Pusyar iB dan pemberian Margin BAZNAS. Informan utama dalam penelitian ini adalah : Bagian Keuangan BPRS dan Bendahara BAZNAS.
3. Informan Pendukung, Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi atas pembiayaan Pusyar iB bagi UMKM dan Margin di BAZNAS. Informan pendukung ini yang terlibat secara langsung yakni pelaku usaha UMKM yang mendapat pembiayaan Pusyar iB.

Penelitian memerlukan data yang valid, sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan, berdasarkan sumbernya jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua menurut Hajar (2006 : 68), yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer. Data data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali yang diperoleh langsung dari informan mengenai keadaan penerima Pusyar iB, dan dalam pengajuan Pusyar iB dalam proposalnya harus diketahui Kepala Desa, Camat dan mendapat rekomendasi UMKM dan IKM dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data Primer ini diperoleh secara langsung dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan BAZNAS Kabupaten Sumenep.
2. Data Sekunder. Data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka, dimana data ini sebagai penunjang dalam penelitian.

Data yang diambil secara relevan terkait dengan permasalahan, yang dapat diperoleh

dari sumber-sumber referensi dan berbagai yang terkait dan relevan, yaitu : Pelaku usaha UMKM dan data dilapangan yang sebenarnya. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara (Sugiyono, 2009 : 63) yaitu :

1. Wawancara (*Interview*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber yang ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pada metode wawancara peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek atau Direktur BPRS dan Sekretaris BAZNAS.
2. Observasi. Merupakan proses pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti sendiri di PT. BPRS dan BAZNAS Kabupaten Sumenep terhadap realita yang ada dan diuji kebenarannya melalui teori. Kegiatan pengamatan langsung di lapangan ini didukung oleh data dan analisa yang telah dipelajari melalui studi literature
3. Dokumen. Menggunakan dokumen-dokumen yang ada dalam melengkapi data terutama data yang berkaitan dengan pembiayaan dan pemberian modal usaha PusyariB.
4. Teknik Kepustakaan. Pada penelitian ini kepustakaan sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan, serta berpedoman pada buku buku ilmiah maupun jurnal internasional dan nasional.

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan model Miles and Huberman yang dikutip Sugiyono (2009 : 245) dalam tiga tahap berikut ini, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Pertama dilakukan identifikasi terhadap unit/bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Merangkum data dan

memilih hal – hal yang dianggap pokok memfokuskan pada hal hal yang penting dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data). Melalui data ini data dapat terorganisir tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Operasionalisasi mengkatagorikan data dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Setiap kategori yang ada dicari kaitannya dengan kemudian diberi label (nama).
3. *Verification* (Verifikasi). Memberikan telaah dari rumusan masalah atas hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengadakan interview langsung kepada informan, yang didukung dengan bukti bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa yang didapat dari hasil interview dengan informan dan observasi serta dokumen, menunjukkan adanya Pusyar iB yang menjadi MOU antara BPRS dan BAZNAS Sumenep, dimana pembiayaan Pusyar maksimal Rp. 5.000.000,- dan margin dibayar oleh BAZNAS sesuai dengan cicilan pada tiap bulannya. Dalam Pemberiannya tentunya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai legalitas dari pelaku usaha, termasuk diketahui oleh Camat dalam mengajukan permohonan Pusyar iB. Resistensi bagi penerima pusyar menginginkan adanya Pusyar untuk diberikan lebih besar sehingga bisa menambah penjualan dan tanpa pengembalian atau cicilan kepada BPRS atau sepenuhnya ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

### **Penguatan Modal Usaha**

Penguatan modal usaha bagi pelaku usaha IKM dari modal pembiayaan program Pusyar iB dapat memberikan peningkatan modal, sehingga tingkat perkembangan dari usahanya lebih meningkat. Resistensi dari pelaku usaha IKM, menginginkan adanya penguatan modal usaha yang lebih besar dari BPRS sehingga usahanya akan lebih besar pula, dan pada tiap bulannya diadakan pembimbingan agar usaha yang ditekuni tetap berjalan. Berbagai bentuk dari resistensi pelaku usaha IKM dalam penguatan modal kerja, yaitu :

- a. Modal kerja yang diberikan dari BPRS yang cukup memadai dalam membuka usaha, serta diadakan pembimbingan secara langsung dari BPRS, guna bisa menutupi dalam tiap bulannya.
- b. Senantiasa BAZNAS secara penuh untuk membayar cicilan kepada BPRS, agar pelaku usaha IKM terfokus pada usahanya dalam menghidupi kelaurganya.
- c. Senantiasa melakukan pengkajian atas pembuatan program, agar penerima jasa pinjaman tidak sia-sia, kalau pinjaman yang diberikan dibatasi, seakan pelaku usaha tidak boleh berkebang.

Pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarkan kerakyatan yaitu upaya terarah menampakkan keperpihakan dan ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan. Pemberdayaan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui pendampingan untuk mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam kelompok yang terorganisir dengan cara belajar bersama terhadap diri dan lingkungan. (Soetomo, 2006 : 87). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu

dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

### **Peningkatan Standar Hidup**

Peningkatan standar hidup dengan adanya pembiayaan Pusyar iB yang dikeluarkan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan margin dari BAZNAS Sumenep sangat jelas untuk memperbaiki kehidupannya melalui penambahan usaha yang selama ini dilakukan. Resistensi para pelaku usaha IKM sangat beralasan, dimana Pusyar dituntut untuk :

- a. Sebagai penambahan modal usaha dalam mengembangkan usahanya yang selama ini ditekuni, pada sisi lain hasilnya untuk dibayarkan kepada BPRS.
- b. Peningkatan standar hidup dalam pembiayaan Pusyar terasa baik, karena digunakan untuk usaha, namun terlalu sedikit dalam menambah usahanya
- c. Alangkah baiknya Pusyar diberikan dengan gratis yang terpenting digunakan untuk kepentingan usahanya dalam memperbaiki standar hidupnya dengan melakukan usahanya.
- d. Resistensi lainnya, bila terdapat tunggakan untuk dapatnya diringankan sebagaimana biasa tidak usaha ada tambahan pembiayaan administrasi lainnya, kalau dikenakan seperti itu, kapan akan bisa berkembang.

Keberadaan Pusyar bagi pelaku usaha IKM cukup beralasan dalam meningkatkan standar hidupnya karena dapat meningkatkan usahanya, namun alangkah baiknya lagi bila pembiayaan Pusyar lebih ditingkatkan.

### **Peningkatan Keberdayaan**

Peningkatan keberdayaan Pusyar iB pada pelaku usaha IKM sangat terasa membantu dalam memperbaiki usahanya dan memperkuat permodalan untuk bisa mengembangkan usaha karena dengan tambahan modal kiprah usahanya semakin berdaya. Program Pusyar iB, akan memberikan keberdayaan bagi pelaku usaha IKM dalam mengembangkan usahanya secara individual dapat berkreasi untuk berjalan apa saja yang terpenting adanya

Pusyar dapat memberdayakan pelaku usaha IKM lebih mandiri dan dapat berdaya sehingga tingkat kesejahteraan akan lebih makmur. Berbagai resistensi dari pelaku usaha dengan menerima Pusyar iB sebagai peningkatan keberdayaan, adalah :

- e. Dalam keberdayaannya penerima Pusyar, namun masih ada tekanan dalam membayar pada tiap bulannya walupun cicilan pokok, dimana tidak sepenuhnya BPRS membantu pelaku usaha untuk berkembang usahanya.
- f. Keberdayaan yang dibuat Pusyar hanya untuk dibuat usaha agar bisa dalam membayar cicilan pada tiap bulannya, sehingga tekad dan semangat pelaku usaha untuk lebih giat dalam menambah penghasilan pada tiap bulannya.

Pemberdayaan adanya bantuan modal kerja dari Pusyar iB sangat membantu lebih berdaya karena modal bertambah kuat dan dengan sendirinya usahanya akan lebih berkembang sesuai dengan keinginan usahanya untuk membukanya. Berwirausaha tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan keinginan pengusaha. Namun semua pengusaha pasti memiliki harapan untuk keberhasilan usahanya.

### **Penyempurnaan Kebebasan**

Penyempurnaan kebebasan dalam penerimaan Pusyar iB sebagai bentuk penguatan modal dapat perluasan aksesibilitas dengan aspirasi kewirausahaan mandiri UMKM, dengan dapat kebebasan dalam berkreasi untuk memperluas dagangannya. Pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep, setelah mendapat Pusyar iB, dipersilahkan dengan kebebasannya dalam menjalankan usahanya demi tercapai kewirausahaan mandiri yang dibangun dirinya sendiri untuk berkembang, namun tidak lupa pula adanya kewajiban dalam memenuhi tiap bulannya pada Pusyar iB sebagai tambahan penguat dalam menjalankan usahanya. Adanya resistensi para pelaku usaha dengan diberi kebebasan dalam

menjalankan Pusyar, sangat baik, namun pada sisi lainnya, yaitu :

- g. Pengelolaan penerimaan pusyar memang terasa bebas untuk dilakukan usaha pada segala macam yang terpenting bisa mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dalam hidupnya.
- h. Penerima pusyar menginginkan kebebasan dalam membayar cicilan, yang terpenting pada suatu saat cicilannya sesuai dengan perjanjian dengan BPRS.
- i. Adanya kebebasan dapat membebani penerima Pusyar karena pada setiap bulannya harus memenuhi cicilan pokonya, walaupun margin dibantu oleh BAZNAS.

Adanya Pusyar sangat membantu pelaku usaha IKM dalam menguatkan modal kerja, oleh karena itu tanamkan pada diri IKM bahwa bekerja dalam tim merupakan kesempatan berharga untuk banyak belajar. Pelajari hal-hal baru di dalam kelompok, yang tak anda temui jika anda bekerja sendiri. Dengan demikian anda dapat lebih mandiri untuk melakukan sesuatu di dalam tim. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumlah banyak namun juga berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk inovatif yang berbeda dari wilayah lainnya. Diperlukan kreativitas yang tinggi untuk dapat menciptakan produk-produk inovatif. Berangkat dari poin inilah, ekonomi kreatif menemukan eksistensinya dan berkembang.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisa yang didapat dari hasil interview dengan informan dan observasi serta dokumen, menunjukkan adanya Pusyar iB adalah program baru dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang menjadi MOU antara BPRS dan BAZNAS Sumenep serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep, dengan pembiayaan

Pusyar maksimal Rp. 5.000.000,- dan margin dibayar oleh BAZNAS dimana resistensi bagi penerima pusyar menginginkan adanya Pusyar untuk diberikan lebih besar sehingga bisa menambah penjualan dan tanpa pengembalian atau cicilan kepada BPRS atau sepenuhnya ditanggung oleh BAZNAS. Adanya resistensi yang dilakukan pelaku usaha IKM secara rinci sebagai berikut :

1. Penguatan modal usaha bagi pelaku usaha IKM dari modal pembiayaan program Pusyar iB dapat memberikan peningkatan modal, sehingga tingkat perkembangan dari usahanya lebih meningkat. Resistensi dari pelaku usaha IKM, menginginkan adanya penguatan modal usaha yang lebih besar dari BPRS sehingga usahanya akan lebih besar pula.
2. Peningkatan standar hidup dengan adanya pembiayaan Pusyar iB yang dikeluarkan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan margin dari BAZNAS Sumenep sangat jelas untuk memperbaiki kehidupannya melalui penambahan usaha yang selama ini dilakukan.
3. Peningkatan keberdayaan Pusyar iB pada pelaku usaha IKM sangat terasa membantu dalam memperbaiki usahanya dan memperkuat permodalan untuk bisa mengembangkan usaha karena dengan tambahan modal kiprah usahanya semakin berdaya.
4. Penyempurnaan kebebasan dalam penerimaan Pusyar iB sebagai bentuk penguatan modal dapat perluasan aksesibilitas dengan aspirasi kewirausahaan mandiri UMKM, dengan dapat kebebasan dalam berkreasi untuk memperluas dagangannya.

Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan kepada BPRS dalam perbaikan Pusyar selanjutnya :

1. Pusyar iB diharapkan pembiayaannya lebih besar, sehingga pengembangan usaha IKM lebih besar dan lebih meluas.

2. Pengelolaan Pusyar iB agar secara penuh tanpa adanya cicilan tiap bulan, sehingga pelaku usaha IKM lebih kuat dalam modalnya.
3. Lebih luas dalam melakukan MOU agar margin lainnya dapat ditanggung oleh penyandang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves.
- Ansoff, H. Igor. (2003). *Strategies for Diversification*. *Journal of Management for growth*. Holland: Volume 3, pp. 113-124.
- Ahmed, P K, Lim, K K, & Loh, A, Y, E. (2009). *Learning Through Knowledge Management*. London: Butterworth – Heinemann.
- Budimanta, dan Bambang Rudito. (2008). *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Schein, Edgar H. (2009). *The Corporate Culture Survival Guide*. Jossey-Bass Publ. San Fransisco.
- Soetomo. (2006). *Strategi strategi* Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sonnenberg, L., Gelsomina, E., Levyb, D. E., Riisc, J., Barracloughd, S., dan Thorndike, A. N. (2009). *Traffic Light Food Labeling Intervention Increases Consumer Awareness of Health and Healthy Choices at the Point-of*

*Purchase. American Journal of Preventive Medicine; 57(4):253-257.*

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Mikro.

Zaltman, G dan Duncan. (1977). *Strategis For Planned Change. A Willey – Intercience Publication John Wiley and Sons, New York, London, Sydney, Toronto.*